

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2014). Statistics For Business and Economics 12th Edition. In *The Statistician* (Vol. 24, Issue 2).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Arif. (2018). *Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, Lutim Duduki Peringkat Pertama di Sulsel.* [Www.Inputrakyat.Co.Id](http://Www.Inputrakyat.Co.Id). <https://inputrakyat.co.id/penyelesaian-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk-ri-lutim-duduki-peringkat-pertama-di-sulsel/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*

- BPK RI. (n.d.). *Peta Administratif*. Www.Sulsel.Bpk.Go.Id. Retrieved March 15, 2022, from <https://sulsel.bpk.go.id/peta-administratif/>
- BPK RI. (2019). *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*. Www.Sulsel.Bpk.Go.Id. <https://sulsel.bpk.go.id/tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-2/>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Fauzi, A. (2019). OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK. *SPEKTRUM HUKUM*, 16(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Hasrul, H. (2016). Pengaruh Hasil Pengawasan Internal Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Poso). *Katalogis*, 4(3).
- Kabupaten Luwu Timur. (2020). *Luwu Timur Raih Posisi Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Semester II*. Www.Portal.Luwutimurkab.Go.Id. <https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/ar/83/جملّة-عنصر-المحتوى/فئات/382-luwu-timur-raih-posisi-tertinggi-penyelesaian-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk-semester-ii>
- Kabupaten Sinjai. (2021). *Sinjai Raih Posisi Ketiga Persentase Tindak Lanjut Tertinggi Hasil Rekomendasi BPK*. Www.Sinjaikab.Go.Id.

<https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/07/01/sinjai-raih-posisi-ketiga-persentase-tindak-lanjut-tertinggi-hasil-rekomendasi-bpk/>

Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 01(01).

Kusuma, P. M., & Kurnasih, L. (2017). PENGARUH OPINI AUDIT DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *EQUITY*, 20(1).  
<https://doi.org/10.34209/equ.v20i1.487>

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. In *Orphanet Journal of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1).

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2).

Masiyah Kholmi. (2017). AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI. *Journal of Innovation in Business & Economics*.

PONGOLIU, R. R., SAERANG, D., & MANOSSOH, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254>

- Rafri Amyulianthy, Anto, A. S., Ufairah, & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1).
- Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2003). Fundamentals of Corporate Finance Sixth Edition. In Ross, Westerfield, and Jordan *Fundamentals of Corporate Finance Sixth Edition* (Vol. 44, Issue 8).
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2686–438), 1–25.
- Sukmaningrum, T., & Harto, P. (2012). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang ). *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019). PENGARUH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN, KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TINDAK LANJUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN. *Jurnal Profita*, 12(2).  
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Warta Pemeriksa BPK. (2021). *Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Harus Bermanfaat. IV.*